

DAFTAR BACAAN

Buku-Buku

- Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence)*, Jakarta: Kencana, 2015.
- Ahmad Mujahidin, *Pembaharuan Hukum Acara Perdata di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2012.
- Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Artidjo Alkostar, *Integritas Hakim dan Penegakan Hukum yang Berkeadilan*, Yogyakarta: UII Press, 2021.
- Bambang Sugeng dan Sujayadi, *Hukum Acara Perdata dan Dokumen Litigasi Perdata*, Cetakan ke-4, Jakarta: Kencana, 2024.
- Bernard L. Tanya, *Teori Hukum: Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*, Yogyakarta: Genta Publishing, 2022.
- Binoto Nadapdap, *Hukum Acara Perdata: Praktik Kemahiran Hukum*, Jakarta: Jala Permata Aksara, 2022.
- Cik Hasan Bisri, *Peradilan Perdata di Indonesia: Landasan Hukum, Struktur, dan Tata Kerja*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2012.
- Dian Rositawati, *Kekosongan Hukum Acara Perdata dan Dampaknya Terhadap Akses Keadilan*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2024.
- Eddy O.S. Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Perdata Internasional dan Nasional*, Jakarta: Erlangga, 2022.
- _____, *Teori dan Metodologi Penemuan Hukum*, Jakarta: Erlangga, 2022.
- H. D. Van Wijk / Willem Konijnenbelt, dalam Sadjijono, *Hukum Kepolisian, Perspektif Hukum Dalam Hubungannya Dengan Hukum Administrasi*, Yogyakarta: Laksbang, 2016.
- Hans Kelsen, *General Theory of Law and State*, diterjemahkan oleh Raisul Muttaqien, Bandung: Nusa Media, 2011.
- Indrohato, *Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik*, dalam Paulus Effendi Lotulung, *Himpunan Makalah Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2016.
- Jan Michiel Otto, *Kepastian Hukum di Indonesia*, diterjemahkan oleh Tristam Moeliono, Jakarta: Komisi Hukum Nasional, 2003.
- Jimly Asshiddiqie, *Peradilan Etik dan Etika Konstitusi*, Jakarta: Sinar Grafika, 2023.
- _____, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi*, Jakarta: Bhuna Ilmu Populer, 2007.
- _____, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2021.

- Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Perdata Indonesia: Norma, Praktik dan Terobosan Hukum*, Bandung: Alumni, 2021.
- M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2021.
- Maria Farida Indrati, *Ilmu Perundang-Undangan: Proses dan Teknik Pembentukannya*, Yogyakarta: Kanisius, 2021.
- Muchsin, *Ikhtisar Hukum Indonesia*, Jakarta: Iblam, 2006.
- Muhammad Fauzan, *Hukum Pemerintahan Daerah* (Edisi Revisi), Purwokerto: Stain Press, 2017.
- Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Kencana, 2015,
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2016.
- Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*, Sural Peradaban, 2021.
- Prajudi Atmosudirjo, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2015.
- Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata, *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek*, Bandung: Mandar Maju, 2009.
- Riduan Syahrani, *Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Umum*, Jakarta: Rhineka Cipta, 2021.
- Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara: Edisi Revisi*, Jakarta: Rajawali Pers, 2022.
- Ridwan Mansyur, *Transformasi Hukum Acara Perdata di Indonesia: Tinjauan Ius Constitutum dan Ius Constituendum Peradilan Modern*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2024.
- Satjipto Rahardjo, *Biarkan Hukum Mengalir: Catatan Kritis tentang Peradilan Indonesia*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2023.
- _____, *Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014.
- _____, *Hukum Progresif: Sebuah Sintesa Hukum Indonesia*, Yogyakarta: Genta Publishing, 2009.
- Salim H. S dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015.
- Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta: Maha Karya Publishing, 2022.
- _____, *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*, Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2019.
- _____, *Penemuan Hukum: Sebuah Pengantar*, Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2014.
- Sutan Remy Sjahdeini, *Kebebasan Hakim dan Kepastian Hukum dalam Hukum Perdata*, Jakarta: PT Utama Grafiti, 2024.

Suyanto, *Metode Penelitian Hukum: Pengantar Penelitian Normatif, Empiris dan Gabungan*, Gresik, Unigres Press, 2022.

Yahya Ahmad Zein, *Hukum Acara Perdata Kontemporer: Perkembangan, Problematika, dan Rekonstruksi Hukum Peradilan Perdata di Indonesia*, Yogyakarta: Deepublish, 2023.

_____, *Hukum Formil Voluntair: Teori dan Praktik Peradilan di Indonesia*, Surabaya: Bina Ilmu, 2022.

Zairin Harahap, *Hukum Acara Perdata Kontemporer*, Yogyakarta: UII Press, 2025.

Jurnal Hukum

Ahmad Rifai, “Problematika Hukum Acara Perdata dalam Penyelesaian Perkara *Voluntair* di Indonesia”, *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Vol. 10, Nomor 2, 2023.

Artidjo Alkostar, “Konstruksi Hukum Progresif dalam Penetapan *Voluntair* di Pengadilan Negeri”, *Jurnal Konstitusi*, Vol. 21, Nomor 1, Maret 2024.

Bagir Manan, “Eksistensi Yudisial dalam Mengisi Kekosongan Hukum Nasional”, *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Vol. 10, Nomor 2, Juli 2022.

Bagir Manan, “Penemuan Hukum oleh Hakim di Tengah Kekosongan Regulasi Formil”, *Jurnal Mimbar Hukum*, Vol. 34, Nomor 1, 2022.

Bagus Anwar, “Problematika Eksekusi Penetapan *Voluntair* Kependudukan” *Jurnal Mimbar Hukum*, Vol. 35, Nomor 1, Februari 2023.

Bernard Arief Sidharta, “Metode Konstruksi Analogi dalam Hukum Acara Perdata Indonesia”, *Jurnal Hukum Jatiswara*, Vol. 38, Nomor 3, November 2023.

Dewa Gede Rudi, “Perlindungan Hukum Pihak Ketiga atas Penyelundupan Hukum Prosedural Melalui Penetapan Peradilan *Voluntair*”, *Jurnal Magister Hukum Udayana*, Vol. 12, Nomor 1, April 2023.

Fitriani Nur dan Andi Muhammad Asrun, “Analisis Yuridis Batasan *Rechtvinding* Hakim dalam Perkara *Ex-Parte* Guna Menjamin Asas Kepastian Hukum”, *Jurnal Lex Renaissance*, Vol. 9, Nomor 3, September 2024.

Hendra Wijaya dan Roro Mariana, “Perlindungan Hak Keperdataan Pihak Ketiga dalam RUU Hukum Acara Perdata Nasional”, *Jurnal Hukum Acara Perdata Adhaper*, Vol. 9, Nomor 2, Juli 2023.

Mahkamah Agung RI, *Laporan Tahunan Mahkamah Agung RI Tahun 2024: Menuju Peradilan Modern Berbasis Kepastian Hukum*, Jakarta: Mahkamah Agung, 2025.

Mahkamah Agung RI, *Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus (Buku II)*, Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2007.

Muhammad Amin dan Siti Nurhaliza, “Redesain Hukum Acara *Voluntair* Menuju Kodifikasi Hukum Acara Perdata yang Responsif”, *Jurnal Lex Renaissance*, Vol. 10, Nomor 2, Agustus 2025.

Muhamad Daffa Zaydan Syauqi dan Muhammad Ath-Thaariq Pratama, “Urgensi Disahkannya RUU Hukum Acara Perdata Bagi Sistem Hukum Indonesia”, *Jurnal Pendidikan dan Humaniora*, Vol. 4 Nomor 2, Oktober 2025.

Santoso Utama dan Rian Saputra, “Batasan Diskresi Hakim dalam Perkara Voluntair yang Bersentuhan dengan Kepentingan Pihak Ketiga”, *Jurnal Hukum Acara Perdata Adhaper*, Vol. 8, Nomor 2, Juli 2022.

Shanti Wulandari dan Ahmad Fikri, “Arah Politik Hukum Kodifikasi Hukum Acara Perdata Nasional: Menakar Urgensi Pengaturan Peradilan Voluntair”, *Jurnal Ius Constituendum*, Vol. 7, Nomor 1, April 2022.

Susi Dwi Harijanti, “Perlindungan Hak Pihak Ketiga dalam Perkara Perdata Ex-Parte”, *Jurnal Hukum Padjadjaran*, Vol. 9, Nomor 3, 2024.

Teguh Prasetyo, “Perlindungan Hak Pihak Ketiga dalam Perkara Ex-Parte”, *Jurnal Hukum Respublica*, Vol. 23, Nomor 2, Agustus 2024.

Peraturan Perundang-undangan

Buku II Mahkamah Agung Republik Indonesia tentang Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus Edisi 2007;

HIR (*Herzien Inlandsch Reglement*);

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata);

RBg (*Rechtsreglement voor de Buitengewesten*);

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum;

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum;

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman;

Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum.